

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dampak Covid-19 telah menimbulkan ketidakstabilan di berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya ketidakstabilan pada kegiatan pembangunan berkelanjutan atau yang disebut sebagai *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan ialah usaha terencana serta sadar untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi pada metode pembangunan agar memberi jaminan keutuhan lingkungan hidup dan keamanan, kemampuan, kesejahteraan, serta kualitas kehidupan generasi sekarang dan mendatang (Tim LHK, 2010). Tidak dapat ditepis bahwa Indonesia adalah termasuk negara yang menyepakati implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDGs)* didefinisikan sebagai seperangkat 17 (tujuh belas) tujuan umum yang ditentukan oleh PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa). Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* memiliki cakupan yang luas serta berkaitan dengan banyak target, yaitu mencapai 169 (seratus enam puluh sembilan) target atau tujuan. Konsep tersebut berakhir pada tahun 2015.

Kerangka kerja *Sustainable Development Goals (SDGs)* tentunya tidak sama dengan *MDGs (Millennium Development Goals)*, dimana konsep kerja *Sustainable Development Goals (SDGs)* tanpa membandingkan negara “maju” dan

“berkembang”, tetapi targetnya diberlakukan kepada seluruh negara. Indonesia yang sudah menyepakati *Sustainable Development Goals (SDGs)* memiliki sejumlah tonggak strategis yang telah dicapai pada akhir tahun 2016. Tonggak strategis Indonesia dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* antara lain (1) pemetaan sasaran *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang memprioritaskan pembangunan nasional, (2) tersedianya data peta serta indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk masing-masing tujuan dan target, salah satunya indikator proksi, (3) menyusun definisi operasional pada masing-masing indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)*, (4) penyusunan Peraturan Presiden yang berkaitan dengan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan serta (5) penyusunan rencana aksi dan keluarga rencana nasional aksi daerah yang berkaitan dengan penerapan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia (BPS, 2021).

Gambar 1. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : *Non-Government Forum (NGO Forum, 1985)*

Seperti pada gambar 1.1 yang tertera di atas *Sustainable Development Goals (SDGs)* memiliki 17 (tujuh belas) tujuan, dimana memiliki makna:

1. Menuntaskan kemiskinan

2. Menghilangkan kelaparan, meraih ketahanan pangan serta peningkatan gizi, dan merencanakan pertanian yang berkelanjutan
3. Memberi jaminan hidup sehat serta mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat
4. Memberi jaminan pendidikan yang berkualitas, adil, serta inklusif dan menambah peluang bagi seluruh kalangan untuk belajar
5. Meraih kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan
6. Memberi jaminan adanya air serta sanitasi yang berkelanjutan
7. Memberi jaminan untuk dapat menjangkau akses energi, dapat diandalkan, dan *modern*
8. Mendorong perekonomian secara menyeluruh, memberi peluang dalam bekerja secara layak dan meningkatkan produktivitas
9. Menciptakan layanan publik yang kuat, mengedepankan industrialisasi inklusif dan inovatif
10. Menurunkan perbedaan antar negara
11. Menciptakan perkotaan serta tempat bermukim yang aman, adil, menyeluruh serta berkelanjutan
12. Memberi jaminan pola produksi serta konsumsi berkelanjutan
13. Bertindak cepat dalam mengatasi pergantian iklim serta dampak yang ditimbulkan
14. Menjaga samudra, laut, serta sumber daya kelautan demi pembangunan berkelanjutan

15. Menjaga dan mengoptimalkan penggunaan ekosistem darat, pengolahan hutan, menanggulangi desertifikasi, serta menghilangkan dan memulihkan degradasi lahan dan mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati
16. Mengoptimalkan masyarakat yang inklusif serta damai pada pembangunan berkelanjutan, memberi akses pada keadilan untuk semua serta menciptakan lembaga yang efektif, akuntabel serta inklusif pada setiap tingkat
17. Memperkuat sarana pelaksanaan serta merevitalisasi kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan (Rudiyanto, 2020).

Uraian di atas disampaikan dalam penelitian indikator lintas industri oleh BPS (Badan Pusat Statistik) bertajuk “Studi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDGs)*” untuk memastikan implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* berlangsung lancar. Pemerintah usai pembentukan Sekretariat Nasional *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang memiliki tugas mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia. Berbagai pemilik kepentingan seperti kementerian/lembaga, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil, badan amal dan dunia usaha sudah terlibat pada seluruh langkah mempersiapkan implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia (Tim BPS, 2010).

Pada penelitian ini, peneliti memutuskan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap instansi pemerintah yaitu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai instansi yang terlibat dalam memastikan implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kemudian secara lebih khusus peneliti memilih salah

satu dari 7 (tujuh) Direktorat Kementerian Luar Negeri yaitu Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik.

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik melaksanakan 5 fungsi, antara lain:

1. Merumuskan aturan terkait informasi dan diplomasi publik
2. Melaksanakan aturan terkait informasi dan diplomasi politik
3. Menyusun norma, standar prosedur, serta ketentuan pada aspek informasi dan diplomasi publik
4. Memberi bimbingan teknis serta menilai terkait aspek informasi dan diplomasi politik
5. Melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 – 2024. Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana yang dirancang dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satunya dalam memperkuat kelembagaan yang tangguh pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pembentukan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan saat pandemi Covid-19 yang berdampak sangat besar bagi tugas dan fungsi negara. Membahas mengenai tuntutan penguatan kelembagaan dan kompetensi pelaksana diplomasi, Hal ini juga sejalan dengan Dekrit Presiden nomor 116 tahun 2020 mengenai kewenangan kelembagaan yang kuat kepada Kementerian Luar Negeri

sebagai koordinator hubungan luar negeri untuk seluruh kementerian dan lembaga.

Upaya penguatan kelembagaan yang sejalan dengan peraturan tersebut perlu adanya dorongan penguatan kelembagaan untuk merealisasikan komitmen Indonesia dalam memberi dukungan domestik melalui pengaturan, institusi, program serta anggaran (Buku Rencana Strategis KEMENLU Tahun 2020-2024, 2020). Rencana Strategis (RENSTRA) inilah yang akan menjadi jembatan penghubung antara penguatan kelembagaan dengan berbagai indikator, sasaran strategis, serta program kerja Rencana Strategis (RENSTRA), terutama Rencana Strategis (JRENSTRA) Direktorat Keamanan Diplomatik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 51 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024, penguatan kelembagaan meliputi pembukaan hubungan diplomatik, revisi indeksasi perwakilan, pembukaan kantor perwakilan, penguatan kapasitas pegawai, peninjauan wilayah rangkapan Perwakilan Republik Indonesia, serta pengaturan dan penetapan perwakilan rawan/berbahaya. Sehubungan dengan diadakannya hubungan diplomatik dan penertiban serta pemberhentian perwakilan rentan/berbahaya, akan diupayakan penguatan kelembagaan yang kuat tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan pelaksanaan tata kelola yang diusung oleh Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Keamanan diplomatik 2020-2024 sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Road Map*, 2020).

Pelaksanaan hubungan diplomatik perlu dilakukan secara aman. Membangun keamanan hubungan diplomatik membutuhkan aturan yang mencakup tujuan yang terkait dengan keamanan diplomatik. Oleh karena itu, keamanan diplomatik dicapai melalui program kerja yang menjadi implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Keamanan Diplomatik 2020-2024 yang tentunya diharapkan dapat memperkuat pengamanan diplomatik yang handal dalam memperkuat kelembagaan yang tangguh sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kementerian Luar Negeri telah sukses meraih berbagai macam tujuan utama yang tercantum didalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Luar Negeri 2015 - 2019. Dengan melihat hasil yang dicapai dalam upaya memperkuat kelembagaan yang tangguh melalui diplomasi Indonesia pada bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Kementerian Luar Negeri berhasil menguatkan kepemimpinan serta perannya dalam mempengaruhi forum multilateral pada aspek lingkungan hidup yaitu sukses mencanangkan 5 (lima) resolusi yang berkaitan dengan lingkungan hidup pada forum *4th United Nations Environment Assembly (UNEA)* di Nairobi pada Maret 2019. Resolusi itu menguatkan konservasi, khususnya mendukung komunitas internasional pada ekosistem utama di Indonesia diantaranya hutan bakau, lahan gambut serta terumbu karang. Pencapaian yang lain ialah dengan dipilihnya wakil Indonesia sebagai *Vice President United Nations Environment Assembly (UNEA)* ke-5 (lima) periode 2020-2021. Indonesia sendiri merupakan anggota dari 3 (tiga) organ pokok *Convention on International Trade in*

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), yakni *Standing Committee*, *Animal Committee*, dan *Plant Committee* sebagai perwakilan kawasan Asia Pasifik.

Pencapaian kerja Kementerian Luar Negeri melalui forum *Indian Ocean Rim Association (IORA)* pada 2017-2018 yakni menciptakan beberapa kesepakatan kerja sama strategis serta konsolidasi kelembagaan yang terdiri dari berbagai aspek diantaranya *countering terrorism and violent extremism*, *blue economy*, pengembangan perikanan berkelanjutan, pengembangan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024, 16 (enam belas) pariwisata berkelanjutan, kesetaraan *gender* serta menguatkan perekonomian perempuan, keamanan maritim, dan membangun perekonomian berkelanjutan, juga penerimaan prakarsa Indonesia tentang isu poros maritim dunia dan *Indo-Pacific Framework*. Usulan Indonesia sudah masuk pada *Decision Report 8th Indian Ocean Rim Association (IORA) Bi-annual Chief Strategy Officer (CSO)*.

Usaha diplomasi perekonomian Indonesia juga terlihat melalui beberapa usaha proaktif dalam mendukung kerja sama ekonomi regional. Indonesia merupakan *key driver* serta *Bridge Builder* ketika berhadapan dengan tantangan pada perundingan tersebut, yaitu ambisinya dalam memberi akses pasar seluas-luasnya di tengah-tengah perbedaan *level of development* antara negara *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*.

Pada 18 Oktober 2019, Wapres Jusuf Kalla mengesahkan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) selaku penerapan “diplomasi tangan di atas”. Lembaga

Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) merupakan pembuktian bahwa Indonesia berkomitmen menguatkan kerja sama regional dan global. Melalui Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI), pelaksanaan pengelolaan dana bantuan hibah Indonesia pada pemerintah dan lembaga asing akan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang efektif dapat mencapai kepentingan negara, terlebih lagi yang berkaitan dengan dukungan pada kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penguatan peran serta pengaruh Indonesia pada tatanan regional dan global, dan melaksanakan diplomasi ekonomi (KEMLU RI, 2020).

Dalam buku yang ditulis oleh Ben Perkasa Drajat selaku Kepala P3K2/PSKK Amerika dan Eropa dengan judul “Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa)”. Penelitian dalam buku ini bertujuan sebagai peningkatan diplomasi Indonesia yang aktif dan efektif guna kepentingan nasional sehingga menciptakan Indonesia yang maju dan berdaulat.

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik memiliki 6 (enam) Rencana Strategis (RENSTRA), antara lain:

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretaris Direktorat Jenderal IDP (Informasi dan Diplomasi Publik)

3. Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Informasi dan Media
4. Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Kerja sama Teknik
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Keamanan Diplomatik
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Diplomasi Publik

Rencana Strategis (RENSTRA) yang diberlakukan sejak 2020 dan tetap berjalan sampai sekarang pada hakikatnya diharapkan mampu menghasilkan implementasi positif terhadap berbagai target yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sejauh ini berjalan, apakah Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut sudah menciptakan hasil pelaksanaan yang baik dan signifikan terhadap tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan? terutama tujuan dalam memperkuat kelembagaan yang tangguh. Sehingga, pada penelitian ini peneliti memfokuskan menganalisis pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Keamanan Diplomatik dalam memperkuat kelembagaan yang tangguh sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan pada Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik SubDirektorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Keamanan Diplomatik dalam

Memperkuat Kelembagaan yang Tangguh sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Keamanan Diplomatik dalam memperkuat kelembagaan yang tangguh?
2. Bagaimana keberhasilan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Keamanan Diplomatik dalam memperkuat kelembagaan yang tangguh?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Menganalisis pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Keamanan Diplomatik dalam memperkuat kelembagaan yang tangguh.
2. Menganalisis keberhasilan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Keamanan Diplomatik dalam memperkuat kelembagaan yang tangguh.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Pada signifikansi akademik ini peneliti menggunakan 10 jurnal penelitian terdahulu sebagai bahan acuan referensi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Penelitian pertama ditulis oleh (Drajat, 2021) dengan judul “Rencana Strategis P3K2 Amerop/PSKK Amerop 2020-2024”. Tujuan yang dituangkan dalam Sasaran Strategis, Arah kebijakan dan Strategi sejalan dengan visi Kementerian Luar Negeri tahun 2020-2024 yakni “Memimpin Diplomasi yang Aktif dan Efektif untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, serta visi BPPK/BSKLN yakni “Menjadi penjuror perumusan rekomendasi strategi kebijakan luar negeri yang berkualitas dalam meningkatkan kiprah diplomasi Indonesia yang aktif dan efektif untuk kepentingan nasional”, P3K2 Amerop/PSKK Amerop memiliki visi yaitu “Menjadi penjuror perumusan rekomendasi strategi kebijakan luar negeri di kawasan Amerika dan Eropa yang berkualitas dalam meningkatkan kiprah diplomasi Indonesia yang aktif dan efektif untuk kepentingan nasional”.

Penelitian kedua ditulis oleh (Darmosumarto, 2020) dengan judul “Rencana Strategis Direktorat Asia Timur dan Pasifik 2020-2024” sebagai wujud manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel”. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Rencana Strategis (RENSTRA K/L) Tahun 2020-2024. Tujuan yang dituangkan dalam Sasaran Strategis, Arah kebijakan dan Strategi. Keseluruhan elemen perencanaan tersebut disusun secara tajam dan konkrit dengan merujuk pada amanah konstitusi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta mempertimbangkan dinamika situasi nasional dan global.

Penelitian tersebut sesuai dengan tema yang digali dalam pembahasan salah satu indikator Rencana Strategis (RENSTRA) terkait pemberdayaan masyarakat yaitu kajian pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ketiga ditulis oleh (Darmalaksana, 2020) dengan judul “Rencana Strategis (RENSTRA) PPPPTK Pertanian”. Rencana Strategis (RENSTRA) Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Pertanian Tahun 2015 - 2019 merupakan rencana jangka menengah 5 (lima) t a h u n menuju kepada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yaitu “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berdasarkan Gotong Royong” yang selaras dengan visi Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Pertanian “Terselenggaranya layanan prima pendidikan dan pelatihan dalam membentuk pendidikan dan tenaga pendidikan yang profesional dan bermartabat serta berdaya saing global”.

Penelitian ini sejalan dengan topik yang sedang dikaji dalam diskusi mengenai bagaimana stabilitas negara, salah satunya pilar pembangunan yang menyebabkan penurunan di banyak industri terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian keempat ditulis oleh (Muntoha & Novitasari, 2018) berjudul “Strategi Optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam Mensukseskan Rencana Strategis 2015-2019 di Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian DIY”. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan sumber daya manusia Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan kuisioner yang diberikan kepada narasumber. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Analisis *Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)*. Hasil penelitian ini didapatkan kekuatan Direktorat Pengamanan Objek Vital (DITPAMOBVIT) Polda DIY personel yang profesional, upaya peningkatan kemampuan bahasa, serta adanya visi, misi dan kebijakan. Kelemahan masih terbatasnya jumlah personel Polri, belum optimalnya peran serta masyarakat, serta sebagian sarana prasarana. Peluang yaitu adanya program prioritas pemerintah, dukungan dari lembaga eksekutif dan legislatif, dan semakin tingginya partisipasi dan peran serta elemen masyarakat. Ancaman kecenderungan meningkatnya kejahatan, perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi dan berkumpulnya banyak suku dari luar daerah yang tinggal di Provinsi DIY.

Penelitian ini sejalan dengan topik yang dibahas dalam pembahasan penelitian tentang indikator Rencana Strategis (RENSTRA), salah satunya terkait pembangunan berkelanjutan.

Penelitian kelima ditulis oleh (Sudirman et al., 2022) dengan judul “Penerapan Perencanaan Elektronik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari: Kontribusi terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)*”. tulisan tersebut memiliki maksud supaya melihat implementasi sistem perencanaan elektronik pada perencanaan pembangunan daerah kota Kendari serta kontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2030. Dengan mempergunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan datanya didapatkan melalui wawancara bersama narasumber di Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kendari. Perolehan penelitian menunjukkan keberhasilan implementasi *e-planning* di kota tersebut adalah berkat landasan hukum yang jelas didukung dengan infrastruktur, sumber daya keuangan serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengetahui penggunaan komputer. Manfaat penerapan perencanaan elektronik adalah metode merencanakan pembangunan yang semakin efisien serta efektif, dan transparansi. Implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada bidang *e-government* melalui *e-planning* yang komprehensif, relevan serta efektif dapat menurunkan tingkat kemiskinan, mengoptimalkan perkembangan perekonomian daerah melalui perencanaan program pembangunan daerah yang berkelanjutan serta optimal dengan memaksimalkan manajemen risiko selama proses membangun. *Sustainable Development Goals (SDGs)* menghasilkan

penduduk serta wilayah yang lebih tangguh. Menjadikan transformasi *digital* sebagai faktor utama terjadinya perubahan tata kelola supaya mendorong perkembangan perekonomian yang berkelanjutan serta inklusif, pembangunan sosial dan melindungi lingkungan.

Penelitian ini sesuai dengan topik yang dikaji dalam pembahasan mengenai adopsi sistem perencanaan elektronik sebagai proses perencanaan pembangunan yang lebih efisien dan efektif. Implementasinya menjadi *Sustainable Development Goals (SDGs)* bidang *e-government* dalam *e-planning* yang komprehensif.

Penelitian keenam ditulis (Setianingtias et al., 2019) dengan judul “Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”. Penelitian tersebut bermaksud mengkaji hubungan antara indikator serta dimensi pembangunan berkelanjutan. Penetapan indikator diperoleh dari publikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta dari perolehan makalah sebelumnya. Unit analisis sampai saat ini ialah semua provinsi di Indonesia dengan mempergunakan data tahun 2015. Metode yang dipergunakan ialah metode persamaan struktural dengan menggunakan *Partial Least Square (PLS)* dalam mereduksi indeks dan mengetahui hubungan antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan serta kelembagaan. Perolehan pemilihan indikator memperlihatkan bahwa dari 50 (lima puluh) indikator, terdapat 19 (sembilan belas) indikator yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan. Pemodelan dengan *Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS)* dapat

menggambarkan antara ekonomi-lingkungan, sosial-ekonomi, kelembagaan-ekonomi, ekonomi-kelembagaan, kelembagaan-sosial, kelembagaan-TPB, lingkungan-TPB, masyarakat-lingkungan, masyarakat-TPB dan TPB-kualitas pembangunan menunjukkan bahwa hasilnya signifikan, tetapi ada hubungan yang dapat diabaikan, yakni hubungan antara institusi dan lingkungan.

Penelitian ini sesuai dengan topik yang dikaji dalam pembahasan analisis hubungan antara indikator dan aspek pembangunan berkelanjutan dan menunjukkan hasil yang signifikan.

Penelitian ketujuh ditulis oleh (Indahsari, 2017) dengan judul “Fungsi *Input's* Dalam Penyusunan Rencana Strategis”. Penelitian ini merupakan sebuah studi dengan kajian khusus yakni mencoba mengetahui *input's* apa saja yang digunakan dalam proses penyusunan renstra dan mencoba menawarkan sebuah alternatif kebutuhan *input's* untuk penyusunan renstra pada periode yang akan datang supaya lebih tepat sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan renstra tahun 2015-2019 menggunakan pendekatan *top down* dan *bottom up*. *Input's* yang digunakan dalam menyusun renstra adalah hasil evaluasi renstra tahun 2010-2014, ketersediaan sumber daya, cita cita dan tantangan ke depan serta, Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penelitian ini sejalan dengan tema yang digali dalam pembahasan pendekatan permasalahan dasar yang tengah berlangsung di masyarakat selama berlangsungnya pembangunan.

Penelitian kedelapan ditulis oleh (Putri, 2020) berjudul “Penguatan Fungsi Keimigrasian Sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024”. Penelitian ini menjabarkan rencana kegiatan strategis yang dirumuskan oleh Ditjenim dalam upaya penguatan peran imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari latar belakang diatas, serta terkait dengan tema penelitian, maka rumusan permasalahan untuk tulisan ini adalah: “Bagaimanakah fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diarahkan dalam perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024”. Tujuannya adalah untuk mengetahui serta menganalisa arah kebijakan dan strategi fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dijabarkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap data - data primer dan sekunder yang didapatkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat merujuk pada agenda pembangunan pemerintah yang menginginkan percepatan pembangunan perekonomian dan infrastruktur melalui reformasi birokrasi dan mengundang investasi sebesar-besarnya masuk ke Indonesia untuk kemashlahatan masyarakat.

Penelitian kesembilan yang ditulis oleh (Putri, 2020) dengan judul “Penguatan Fungsi Keimigrasian Sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024”. Hasil penelitian ini memuat pada perencanaan strategis Ditjen imigrasi tahun 2020-2024 program keimigrasian lebih mengarah untuk menguatkan fungsi imigrasi yang mengamankan negara dan memberi fasilitas pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan serta strategi yang dimaksudkan mengarah pada pergeseran fokus program imigrasi tahun 2015-2019 yang memprioritaskan organisasi untuk berupaya mengoptimalkan layanan serta menegakkan hukum imigrasi. Penguatan fungsi imigrasi selaku pemberi fasilitas pembangunan kesejahteraan masyarakat mengarah pada rencana pembangunan pemerintah yang mengharapkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi serta infrastruktur dengan mereformasi birokrasi serta mengajak investor sebesar mungkin untuk memasuki Indonesia demi kesejahteraan masyarakat. Imigrasi berperan besar dalam mendukung secara fisik serta misi tersebut melalui pembuatan aturan yang ramah terhadap investasi dan pengimplementasian inovasi ke sistem yang terintegrasi serta terkoneksi dan pelaksanaan informasi birokrasi pemerintahan pada layanan keimigrasian.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti pada bagian pembangunan mengenai perencanaan strategis Ditjen imigrasi tahun 2020-2024 program keimigrasian lebih mengarah untuk menguatkan fungsi

keimigrasian yakni untuk mengamankan negara dan memberi fasilitas pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian kesepuluh ditulis oleh Clarita Rosa Riflyani Gultom, Saifullah Zakaria (2020) dengan judul “Pengawasan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Sebagai Upaya Praktek *Good Governance* di Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia”. Dalam konteks ini Irjen Kemlu tidak memantau secara optimal pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Tata Kelola Umum Kerjasama Multilateral (KSM) karena beberapa kendala, maka nilai dari penelitian tersebut ialah supaya menganalisis serta menjelaskan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebagai upaya penerapan *good governance* di lingkungan Kerjasama Multilateral Direktorat Jenderal Kementerian Luar Negeri. Komunikasi dari tahapan pemantauan menurut Sururama dan Amalia (2020). Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang dipergunakan ialah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan analisis *strengths, weaknesses, opportunities, threats (SWOT)*. Teknik verifikasi data yang dipergunakan adalah *membership, cross check, dan reference check*.

Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa Inspektur Jenderal telah melakukan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku, namun masih

terkendala dengan angka pergantian yang tinggi, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan birokrasi yang rumit. Diperlukan upaya yang serius untuk menghadapi berbagai kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil redaksi dapat disimpulkan bahwa Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral (KSM), namun pengawasan tersebut tidak berlangsung dengan optimal dikarenakan terdapat permasalahan diluar dampak.

Penelitian ini sesuai dengan tema yang dibahas dalam diskusi implementasi *good governance* di Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral (KSM) sebagai bentuk implementasi kelembagaan.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengenai indikator Rencana Strategis (RENSTRA). Ben Perkasa Drajat (2021), Retno L.P Marsudi (2020), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (2020), Muntoha (2021), Faturachman Alputra Sudirman, Elfira Iman Sari, Akhyar Abdullah (2022), Retno Setianingias, M. Baiquni, Andri Kurniawan (2019), Putri Indahsari (2016), Rima Sari Indah Putri (2020), Clarita Rosa Riflyani Gultom, Saifullah Zakaria (2020) .

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, yang mana hanya terfokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan serta indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)* saja. Pada perihal ini peneliti belum memperoleh penelitian yang membahas secara fokus mengenai pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Keamanan Diplomatik dalam memperkuat

kelembagaan yang tangguh sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Secara akademis, hasil temuan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penelitian mengenai pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Keamanan Diplomatik dalam memperkuat kelembagaan yang tangguh sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pemahaman mendalam peneliti terkait dengan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Keamanan Diplomatik dalam memperkuat kelembagaan yang tangguh sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Manfaat bagi pemerintah

Dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menjadi saran, rekomendasi, masukan, bahan pertimbangan, serta evaluasi bagi pemerintah terutama bagi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik SubDirektorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

3. Manfaat bagi masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat supaya lebih ikut serta pada program

pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah. Dengan masyarakat berpartisipasi diharapkan program pembangunan ini nantinya memberikan hasil yang baik untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan ini merupakan program yang dijalankan oleh pemerintah sebagai bentuk kemajuan pembangunan Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari permasalahan yang melatarbelakangi atau alasan-alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam kerangka teori biasanya terdiri dari definisi variabel, dimensi (aspek/prinsip-prinsip/faktor-faktor yang mempengaruhi atau hal-hal lain yang relevan dan terkait dengan variabel penelitian).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan serta pemahaman mengenai metode yang dipergunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas terkait objek penelitian serta perolehan penelitian dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran dan rekomendasi.

